



INDONESIA DEVELOPMENT FORUM

INSPIRE • IMAGINE • INNOVATE



KNOWLEDGE
SECTOR INITIATIVE



Indonesia Development Forum 2017

Fighting Inequality for Better Growth

Jakarta, 9-10 August 2017





INDONESIA
DEVELOPMENT
FORUM

INSPIRE • IMAGINE • INNOVATE



KNOWLEDGE
SECTOR INITIATIVE



INTERNATIONAL DEVELOPMENT FORUM “PEMUTUSAN LINGKARAN SETAN KORUPSI”



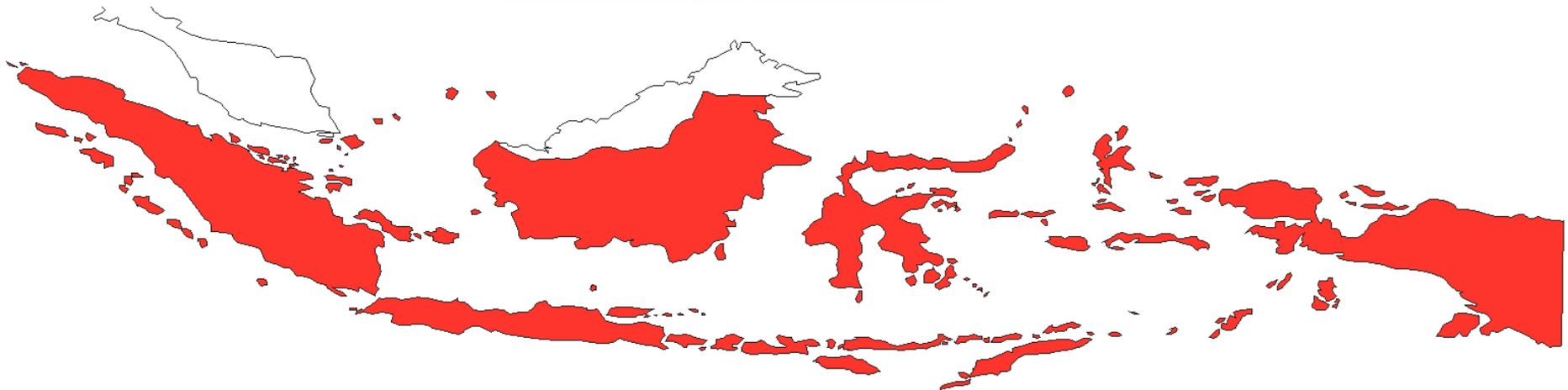


KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INTERNATIONAL DEVELOPMENT FORUM “PEMUTUSAN LINGKARAN SETAN KORUPSI”

JAKARTA, 09 AGUSTUS 2017





**SATGAS SABER PUNGLI SEBAGAI TASK FORCE
“UNTUK MEMERANGI KETIMPANGAN”**

**OLEH:
SRI WAHYUNINGSIH, SH, M.Hum
INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**



STRUKTUR ORGANISASI



TKT PUSAT





SATUAN TUGAS SATGAS SAPU BERSIH PUNGLI (SABER PUNGLI)

Perpres Nomor 87 Th 2016 tentang SABER PUNGLI

Satuan tugas Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi :

1. Intelijen;
2. Pencegahan;
3. Penindakan; dan
4. Yustisi.

Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang

1. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
3. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
4. melakukan operasi tangkap tangan;
5. memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
7. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.



TASK FORCE (GUGUS DEPAN)

**Peraturan Presiden (Perpres) No 87 Tahun
2016**

**Tentang
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar**

MENIMBANG

Bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan scr tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera.



UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN

- MEMBENTUK UPP, BAIK DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA;
- MEMBUAT ATURAN, PERBAIKAN SISTEM DAN MEMBENTUK TIM TERPADU;
- MELAKUKAN SOSIALISASI;
- PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS;



PEMETAAN RAWAN PUNGLI

SUMBER PERMASALAHAN

- ❑ SABER PUNGLI MENERIMA **31.110 LAPORAN/ADUAN DENGAN KARAKTERISTIK PENGADUAN PADA :**
 - ✓PELAYANAN MASYARAKAT
 - ✓HUKUM
 - ✓PENDIDIKAN
 - ✓PERIJINAN
 - ✓BARANG DAN JASA
 - ✓KEPEGAWAIAN
- ❑ Untuk Keuangan (Hibah & basos serta Dana Desa)

WILAYAH TERTINGGI PENGADUAN

- PROVINSI JAWA BARAT;
- DKI JAKARTA;
- SUMATERA UTARA;
- JAWA TIMUR
- BANTEN DAN;
- LAMPUNG.



TINDAKAN

HASILNYA →

1. **TELAH MELAKSANAKAN 917 KEGIATAN OTT DAN TERSANGKA SEJUMLAH 1.834 ORANG DENGAN NILAI SEJUMLAH Rp 17,6 M,-.**
2. **PENGENAAN SANKSI DISIPLIN PNS SESUAI DENGAN PP 53 TAHUN 2010.**
3. **TERBITNYA PP 12 TAHUN 2017 TENTANG BINWAS PEMDA (PENGENAAN SANKSI KEPADA KEPALA DAERAH DAN DPRD)**

VISI MISI SABER PUNGLI

TERWUJUDNYA
PELAYANAN PUBLIK
PADA
KEMENTERIAN/LEMBAG
A DAN PEMERINTAH
DAERAH YANG
TERBEBAS DARI
PUNGUTAN LIAR.





KOMITMEN PIMPINAN

Kepemimpinan merupakan komponen vital yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Seorang pemimpin adalah figure yang menentukan arah organisasi, warna organisasi termasuk pengembangan kualitas anggota-anggota dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya diperlukan komitmen yang kuat secara tulus dan sungguh-sungguh dalam menjalankan roda organisasi sesuai dengan aturan.

Komitmen adalah suatu ketentuan untuk berjanji kepada diri sendiri yang akan memacu seseorang untuk terus berjuang dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan.



PROGRAM PEMERINTAH

Pemerintahan Presiden Joko Widodo-jusuf Kalla Telah Menetapkan Nawa Cita Sebagai Agenda Prioritas Pembangunan, Guna Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian.

Dimulai Dengan Pembangunan Fondasi Dan Dilanjutkan Dengan Upaya Percepatan Diberbagai Bidang, Salah Satunya Reformasi Dibidang Hukum Meliputi 3 Pilar Utama, Yakni : Penataan Regulasi, Pembenahan Lembaga/Aparat Penegak Hukum Serta Pembangunan Budaya Hukum Menciptakan Budaya Hukum Yang Kuat.

LANGKAH UTAMA MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

KESATU

PEMERINTAH DAERAH HARUS MENJAGA KONSISTENSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

KEDUA

KUALITAS APDB HARUS TEPAT WAKTU, PRO RAKYAT DAN TRANSPARAN

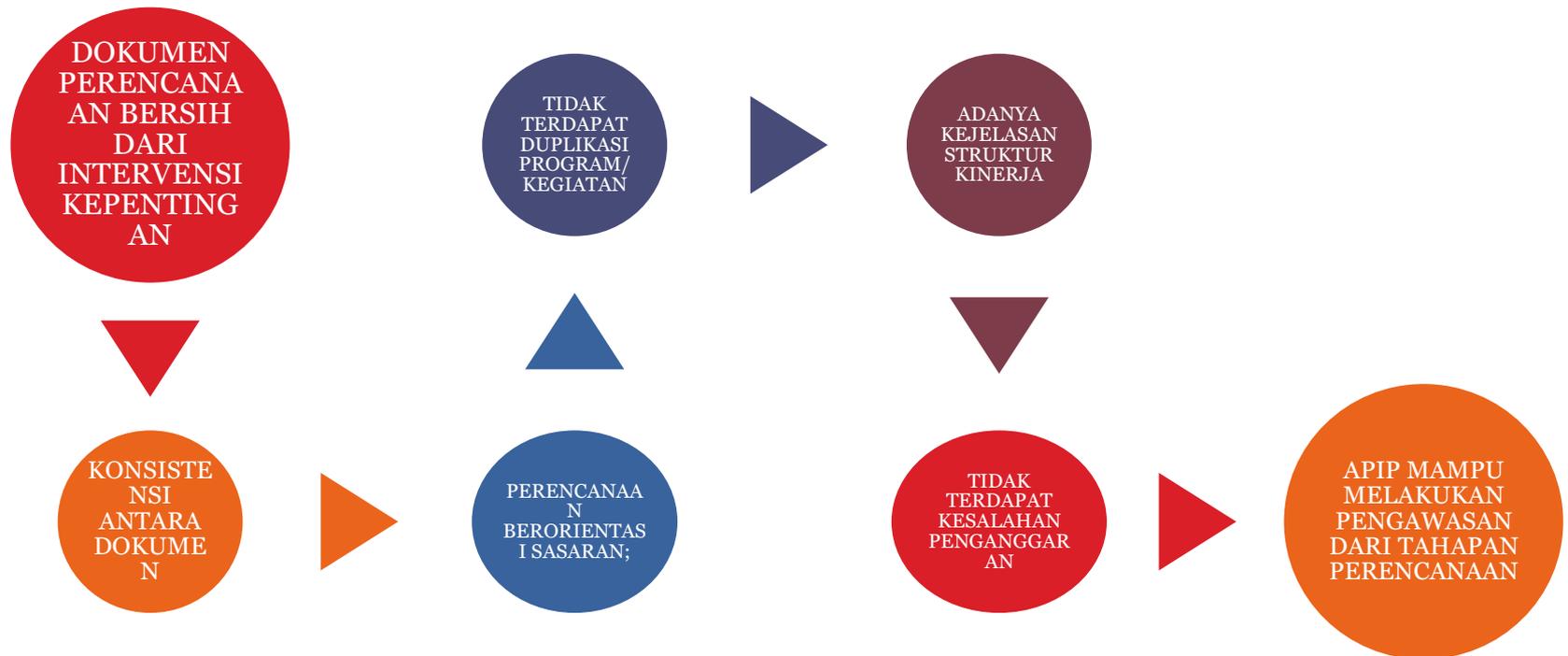
KETIGA

PEMDA MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAH SEBANYAK 31 URUSAN SESUAI DENGAN NORMA, STRANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA

KEEMPAT

PENGELOLAAN KEUANGAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN MENDAPATKAN OPINI WTP DARI BPK

KEMENDAGRI MEWAJIBKAN KEPADA SELURUH PEMDA UNTUK MENERAPKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH BERBASIS E-PLANING DAN E-BUGETING



POTRET PENGANGGARAN DAERAH SECARA NASIONAL

PENETAPAN APBD TAHUN 2017, HANYA 23 PROVINSI, 339 KABUPATEN DAN 81 KOTA YANG TEPAT WAKTU

BELANJA TIDAK LANGSUNG MASIH LEBIH BESAR YAITU 59,61% DIBANDINGKAN BELANJA LANGSUNG YANG HANYA 40,39%

DERAJAT OTONOMI FISCAL YAITU RASIO PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP TOTAL PENDAPATAN MASIH RELATIVE RENDAH, YAITU RATA-RATA 33,85%

BESARAN BELANJA MODAL RATA-RATA SECARA NASIONAL HANYA SEBESAR 18,13% DARI TOTAL BELANJA

PROPORSI BELANJA PERJALANAN DINAS, HIBAH DAN BANSOS MASIH RELATIF TINGGI

KELEMAHAN MENDASAR DALAM PENGELOLAAN APBD

KESATU

- REALISASI ANGGARAN CENDERUNG TIDAK MENCAPAI TARGET 100%

KEDUA

- KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

KETIGA

- KETIDAKPATUHAN ENTITAS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



ADA PUNGLI, LAPOR SEGERA !!

SEKIAN TERIMAKASIH

